

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ilmu akuntansi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini semua aktivitas lembaga publik maupun swasta dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel. Perkembangan pesat lembaga publik ini disebabkan karena lembaga ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya dalam hal pembayaran pajak dan berpengaruh pula pada pelayanan masyarakat (Endang, 2017). Hal ini semakin memperjelas pentingnya informasi akuntansi di setiap lini organisasi.

Tidak hanya pada lembaga pemerintahan, lembaga keagamaan saat ini pun tengah menjadi sorotan. Berdasarkan hal tersebut lahirlah sebuah ide yang menghadirkan praktik akuntansi pada lembaga keagamaan baik itu masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya. Selain itu, alasan yang melatarbelakangi ide tersebut yaitu dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang akuntansi untuk Entitas Peribadatan. Bastian (2007) mengemukakan bahwa organisasi keagamaan juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya. Berbagai tuntutan tersebut telah menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik, termasuk

lembaga atau organisasi di lingkup organisasi keagamaan. Akuntansi pada organisasi keagamaan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk lengkap maupun secara sederhana sekalipun.

Lembaga keagamaan berupa masjid hadir dengan tanggung jawab pengelolaan dana yang diberikan oleh jamaah. Dimana para jamaah menyerahkan dananya untuk tujuan sosial keagamaan yang tentunya tidak mengharapkan imbalan secara langsung kepada dirinya. Namun sebagai nilai keagamaan atau kepercayaan yang ia jalin antara dirinya kepada sang pencipta Allah *Subhanallahu wa ta'ala*. Sebagaimana didirikannya lembaga masjid ini sebagai sarana peribadatan umat muslim kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala* yang didalamnya tidak hanya terdapat tujuan beribadah. Namun juga sebagai sarana pemberdayaan umat terutama disekitar wilayah masjid tersebut (www.kompasiana.com).

Selain itu, disisi pengurus takmir masjid diperlukan suatu penyampaian informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya meskipun posisi tersebut hanya sebatas kerelaan. Kredibilitas inilah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Banyak masyarakat yang antipati terhadap masjid, dikarenakan pengurus masjid tidak transparan dalam memberikan laporan keuangan dan pengelolaan masjid yang tidak baik menyebabkan jamaah masjid banyak yang keluar. Permasalahan lain yang seringkali muncul yaitu masih banyaknya masjid yang tidak mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat

sebatas penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid untuk apa saja, sehingga terkadang hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat (Andarsari, 2016).

Ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa diperlukan akuntansi dalam masjid. Pertama, adanya tuntutan dari Agama. Sesuai perintah Allah dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

“hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”

Kedua, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan penggunaan dana oleh takmir masjid yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan masjid yang mana dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya. Alasan ketiga, yang cukup relevan yaitu menyinggung tentang keterbukaan informasi bagi para donatur masjid. Para pihak eksternal lain selain donatur juga ingin mengetahui sebagaimana aliran dana yang masuk, serta alokasi-alokasi dan kelangsungan dana yang terhimpun di masjid tersebut (www.kompasiana.com).

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Januarsih (2011) yang mencoba untuk memverifikasi praktik akuntansi

masjid dan menggambarkannya. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan praktik akuntansi masjid akan membuat riya dan mempengaruhi pelaporan keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Endang (2017), menunjukkan bahwa akuntabilitas yang diterapkan hanya berdasarkan budaya tradisi dan belum dituangkan dalam aturan yang tertulis, namun pengelolaan keuangan telah disepakati dan diketahui oleh pengurus masjid.

Fokus dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas yang dilakukan oleh para pengurus masjid yang ditinjau dari ukuran masjid. Salah satu usaha untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam organisasi peribadatan yaitu dengan menciptakan akuntabilitas yang baik dengan menyelenggarakan praktik akuntansi. Karena praktik akuntansi itu sendiri merupakan bentuk dari akuntabilitas yang dapat mengurangi kecurigaan masyarakat atas kinerja dari pengurus masjid itu sendiri.

Berdasarkan ukurannya masjid dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu masjid besar dan masjid kecil. Klasifikasi masjid ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas yang sekaligus menunjukkan kualitas masjid tersebut. Masjid kecil terdiri dari fasilitas utama, sedangkan masjid besar terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Yang termasuk fasilitas utama adalah mimbar, mihrab, tempat adzan, tempat wudhu, kamar mandi, toilet. Adapun fasilitas pendukung adalah menara, kantor pengurus, majelis taklim, perpustakaan, baitul mal, Unit Pelayanan Zakat (UPZ), dan lain-lain (Dewan Masjid Indonesia, 2008).

Masjid besar memiliki fasilitas yang lebih lengkap daripada masjid kecil. Salah satu fasilitas itu adalah kantor pengurus. Adanya kantor pengurus membuktikan kelengkapan sebuah pengurus masjid yang dapat meningkatkan potensi pemisahan tugas keuangan. Masjid besar biasanya mempekerjakan pegawai yang lebih banyak daripada masjid yang berukuran lebih kecil. Masjid yang lebih besar juga mungkin mempekerjakan seseorang dengan keahlian di bidang akuntansi dan administrasi. Perbedaan inilah yang membuat kualitas pengendalian sistem intern di masjid yang berukuran besar dengan masjid yang berukuran kecil berbeda (Andriani, 2011). Berdasarkan pernyataan Andriani (2011) bahwa jika dilihat dari ukuran masjid sistem pengendalian intern memiliki perbedaan sehingga peneliti tertarik melihat perbedaan dari segi akuntabilitasnya. Dimana masjid yang berukuran besar mungkin memiliki akuntabilitas yang lebih baik daripada masjid yang berukuran kecil.

Penelitian ini didasari penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2011) dengan judul Analisis Perbedaan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Masjid Ditinjau Dari Ukuran Masjid Dan Tipe Organisasi Islam Pengelola Masjid. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jumlah variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 2 variabel independen sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel independen. Untuk itu peneliti mengangkat judul **Analisis Perbedaan Akuntabilitas Masjid Ditinjau Dari Ukuran**

Masjid (Studi Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada lembaga publik maupun swasta saat ini tengah menjadi sorotan. Karena pelaporan keuangan merupakan aktifitas terpenting dalam organisasi non laba.
2. Kurangnya kesadaran dari pengurus masjid terhadap laporan keuangan masjid. Dimana sering kali pengurus masjid tidak mencatat secara rinci setiap transaksi yang terjadi dalam masjid.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan akuntabilitas hukum dan kejujuran antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
2. Apakah terdapat perbedaan akuntabilitas proses antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
3. Apakah terdapat perbedaan akuntabilitas program antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?

4. Apakah terdapat perbedaan akuntabilitas kebijakan antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
5. Apakah terdapat perbedaan akuntabilitas finansial antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?

2.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan akuntabilitas hukum dan kejujuran antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan akuntabilitas proses antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan akuntabilitas program antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan akuntabilitas kebijakan antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
5. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan akuntabilitas finansial antara masjid besar dan masjid kecil di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai akuntabilitas masjid ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuannya mengenai materi yang terkait mengenai penulisan skripsi. Manfaat lainnya adalah peneliti mendapatkan pengetahuan baru mengenai akuntansi masjid.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi buat peneliti yang ingin mengangkat masalah serupa.
- c. Bagi pembaca, bermanfaat untuk bahan informasi mengenai perbedaan akuntabilitas masjid ditinjau dari ukuran masjid.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi untuk penyempurnaan dalam perbaikan/peningkatan kinerja pengurus masjid untuk pertimbangan pengambilan sebuah keputusan terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan akuntansi dalam lingkungan masjid.
- b. Dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Dewan Masjid bahwa akuntabilitas pada masjid maupun tempat ibadah lainnya sangat diperlukan.
- c. Menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti objek penelitian yang sama dengan penelitian ini.